

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM yang handal, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtangaan yang baik, serta pengelolaan BMN yang tepat dan transparan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	Hilang/ rusak nya dokumen pegawai
				Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan
				adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan
				keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu
				kurang optimal dalam pengembangan pegawai
				kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional
				Mutasi (rotasi dan promosi) pejabat yang tidak sesuai
				Keterlambatan waktu pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun
			terselenggaranya pengelolaan BMN dan kerumahtangaan yang akuntabel dan transparan	Terlambat penyerahan kelengkapan entry data belanja modal dan belanja persediaan
				Proses penghapusan BMN yang sangat lama/panjang
			Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor
			terbangunnya citra positif BPHN, administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan arsip BPHN	Publikasi tidak dilakukan sepenuhnya oleh Humas
				Kerjasama yang diadakan di pusat-pusat dengan Kementerian/LSM tidak di laporkan ke sub Fasilitasi Kerjasama
				belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan yang efektif dan efisien
				belum maksimalnya penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.
	belum maksimalnya penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.			
	Ketidakandalan Laporan Keuangan BPHN			
	Pembayaran gaji pegawai melebihi anggaran yang tersedia			

			Perbedaan antara nominal dalam tagihan dengan dokumen RKA-KL/DIPA
			Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan
			Perbedaan kode klasifikasi akun di dalam RKA-KL/DIPA dengan pertanggungjawaban keuangan yang diinput pada aplikasi SAS
			Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA
		tersusunnya dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Website www.bphn.go.id Down
			Pengelolaan / pengembangan TI tidak maksimal
			Rekapitulasi Data (hardcopy / softcopy) tidak terpenuhi
			Dokumen Laporan kinerja belum lengkap
		Tersusunnya dokumen rencana Program dan Anggaran Yang Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak berbasis outcome

Jakarta

Kepala Satker X

Tersusunnya dokumen pelaksanaan RB dan data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu

XYZ

NIP. --

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	Hilang/ rusak nya dokumen pegawai	Kehilangan data sebagian kecil pegawai	Sekretariat BPHN	Kelalaian	Internal	C	Pegawai tidak dapat naik pangkat, pensiun, mutasi, dll	Pegawai BPHN	optimalisasi SIMPEG dan melakukan scanning data (digitalisasi data)	Kehilangan data sebagian kecil pegawai	Risiko Operasional
			kehilangan data seluruh pegawai		bencana	eksternal	UC		BPHN dan Kementerian			kehilangan data seluruh pegawai
		Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Sekretariat BPHN	Load server simpeg tinggi terutama disebabkan oleh pegawai yang terlambat melakukan pengisian simpeg atau pegawai baru melakukan pengisian simpeg saat mendekati waktu penarikan data	eksternal	UC	Keterlambatan laporan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan serta pemotongan tunjir pegawai yang bersangkutan	Seluruh pegawai (BPHN)	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Risiko Operasional
										Membuat Surat Edaran		Risiko Operasional
		adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Sekretariat BPHN	pembina kepegawaian responsif terhadap perubahan kebijakan kepegawaian serta kurang koordinasi terkait dengan penerapan kebijakan kepegawaian	internal/eksternal	C/UC	Pembinaan kepegawaian yang tidak sesuai aturan	BPHN	Mengadakan kegiatan sosialisasi aturan hukum tentang kepegawaian	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Risiko Operasional
										Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait		Risiko Operasional
		keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu	Penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terlambat dilaksanakan	Sekretariat BPHN	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	Internal	C	Pejabat fungsional tertentu tidak dapat naik pangkat/jabatan tepat waktu	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan (UNIT ESELON I)	Mengadakan rapat koordinasi Tim Penilai	Penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terlambat dilaksanakan	Risiko Operasional
		kurang optimal dalam pengembangan pegawai	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	Sekretariat BPHN	kurangnya pengetahuan pengelola kepegawaian terkait proses analisis kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan pegawai	Internal	C	Pegawai kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya	BPHN dan Kementerian	Memberikan bimtek kepada pengelola kepegawaian terkait proses analisis kebutuhan diklat	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	Risiko Operasional
		kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Sekretariat BPHN	kelalaian	Internal	C	Pegawai tidak dapat naik pangkat dan naik jabatan	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan (UNIT ESELON I)	Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional secara aplikasi	kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Risiko Operasional
		Mutasi (rotasi dan promosi) pejabat yang tidak sesuai	Pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Sekretariat BPHN	keterbatasan SDM	internal	C	Tidak terpenuhinya pencapaian tugas dan fungsi dari organisasi	BPHN dan Kementerian	Melakukan assessment terhadap seluruh pegawai	Pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Risiko Operasional
Keterlambatan waktu pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun	SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun terlambat diterima	Sekretariat BPHN	lambatnya usulan dan berkas yang diajukan dari pegawai tidak lengkap	internal	C	Keterlambatan Kenaikan Pangkat dan pembayaran Pensiun pegawai	Pegawai yang bersangkutan (BPHN)	digitalisasi dokumen pegawai dan pemahaman kepada pegawai untuk menyamakan persepsi dalam hal kelengkapan dokumen, apabila pegawai memiliki data terbaru segera disampaikan ke bagian kepegawaian untuk diproses digitalisasi	SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun terlambat diterima	Risiko Operasional		

2	terselenggaranya pengelolaan BMN dan kerumahtangaan yang akuntabel dan transparan	Terlambat penyerahan kelengkapan entry data belanja modal dan belanja persediaan	Terdapat selisih antara laporan BMN dengan laporan keuangan	Sekretariat BPHN	Data yang akan diinput/dientry belum diterima	Internal	C	Tidak bisa melakukan rekon internal dengan bagian keuangan (sub AKLAP)	BPHN dan Kementerian	Rapat koordinasi	Terdapat selisih antara laporan BMN dengan laporan keuangan	resiko pelaporan
3	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	Sekretariat BPHN	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	Internal	C	Kinerja pegawai tidak optimal	BPHN	Pemeliharaan	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	resiko operasional
		Proses penghapusan BMN yang sangat lama/panjang	Penumpukan barang rusak berat	Sekretariat BPHN	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian	eksternal	UC	Penghapusan BMN terlambat	BPHN	Koordinasi dengan instansi terkait	Penumpukan barang rusak berat	Resiko Pelaporan dan operasional
4	terbangunnya citra positif BPHN, administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan arsip BPHN	Publikasi tidak dilakukan sepenuhnya oleh Humas	adanya pemberitaan yang berbeda	Sekretariat BPHN	pusat-pusat dilingkungan BPHN mempunyai media publikasi sendiri-sendiri	internal	C	dis informasi	BPHN dan masyarakat	Rapat koordinasi	adanya pemberitaan yang berbeda	Risiko Reputasi
		Kerjasama yang diadakan di pusat-pusat dengan Kementerian/LSM tidak dilaporkan ke sub Fasilitasi Kerjasama	data kerja sama tidak akurat	Sekretariat BPHN	Kurangnya koordinasi pusat-pusat dalam hal kerja sama	internal	C	tidak dapat memberikan data yang valid	BPHN dan Kementerian	SOP	data kerja sama tidak akurat	
		belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan yang efektif dan efisien	tidak tertibnya administrasi persuratan	Sekretariat BPHN	Pemahaman Tata kelola Persuratan yang masih kurang	internal	C	pengelolaan persuratan tidak tepat	BPHN dan Kementerian	SOP	tidak tertibnya administrasi persuratan	Risiko Oprasional
		belum maksimalnya penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Sekretariat BPHN	pemahaman kearsipan yang masih kurang	internal		tidak dapat melakukan pengelompokan serta pemusnahan arsip dengan baik	BPHN dan Kementerian	SOP	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Risiko Oprasional
		belum maksimalnya penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Sekretariat BPHN	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	internal	C	Sisumaker yang terbengkalai	BPHN dan Kementerian	SOP	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Risiko Oprasional

5	Terselenggaranya Layanan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Ketidakandalan Laporan Keuangan BPHN	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	Sekretariat BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	Internal dan Eksternal	C	Penurunan Tunjangan Kinerja	BPHN dan Kementerian	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan tingkat Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	Resiko Reputasi
			Kurangnya koordinasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	Sekretariat BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	Internal dan Eksternal	C	Kinerja tidak tercapai	BPHN dan Kementerian	Koordinasi dan Komunikasi tingkat Internal dan Eksternal secara intens	Kurangnya koordinasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	Resiko Pelaporan
		Pembayaran gaji pegawai melebihi anggaran yang tersedia	Terjadinya pagu minus pada anggaran belanja pegawai	Sekretariat BPHN	Perhitungan Anggaran pada Aplikasi GPP tidak bisa memprediksi keperluan Belanja Pegawai tahun berikutnya	Internal/ Eksternal	C	Pembayaran gaji pegawai tidak mencukupi untuk 12 bulan	BPHN dan Kementerian	Optimalisasi sisa hasil kegiatan melalui revisi anggaran	Terjadinya pagu minus pada anggaran belanja pegawai	Resiko Operasional
		Perbedaan antara nominal dalam tagihan dengan dokumen RKA-KL/DIPA	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Sekretariat BPHN	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	Internal	C	Kekurangan/kelebihan pembayaran	BPHN dan Pihak Ketiga	Peningkatan SDM Pengelola Keuangan	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Resiko Operasional
		Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan	Keterlambatan <i>revolving</i> penggunaan Uang Persediaan	Sekretariat BPHN	Ketidakpatuhan Pelaksana Kegiatan terhadap SOP Pertanggungjawaban	Internal	C	Tidak bisa pengajuan Uang Persediaan	BPHN	Penerapan sanksi terhadap pelaksana kegiatan yang tidak tepat waktu	Keterlambatan <i>revolving</i> penggunaan Uang Persediaan	Resiko Kepatuhan
		Perbedaan kode klasifikasi akun di dalam RKA-KL/DIPA dengan pertanggungjawaban keuangan yang diinput pada aplikasi SAS	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Sekretariat BPHN	Kelalaian penginputan akun pada aplikasi	Internal	C	Akun yang seharusnya belum digunakan sudah terpakai untuk akun lain dan sisa pagu tidak mencukupi	BPHN	Kecermatan dalam penginputan akun pada aplikasi	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Resiko Operasional
		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA	Revisi halaman III DIPA	Sekretariat BPHN	Berubahnya jadwal kegiatan	Internal		Rendahnya nilai IKPA	BPHN dan Kementerian	Monitoring dan Evaluasi Kalender Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA	Resiko Reputasi
6	tersusunnya dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Website www.bphn.go.id Down	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	Sekretariat BPHN	Provider	External	UC	1. Pegawai tidak dapat mengakses Mail Bphn.go.id 2. Internal Kemenkumham dan masyarakat luas tidak dapat memberikan masukan dan menerima Informasi hukum	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	1. Laporan Service Level Agreement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	
		Pengelolaan / pengembangan TI tidak maksimal	Pemanfaatan penggunaan system teknologi informasi thd kegiatan tidak banyak	Sekretariat BPHN	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	Internal	C	Lambatnya pengelolaan kegiatan yang berbasis TI	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Pemanfaatan penggunaan system teknologi informasi thd kegiatan tidak banyak	
		Rekapitulasi Data (hardcopy / softcopy) tidak terpenuhi	Data/laporan hasil kegiatan tidak lengkap/tidak sesuai RKAKL	Sekretariat BPHN	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	Internal	C	1. Tidak lengkapnya data (hardcopy / softcopy) hasil kegiatan BPHN pada tahun kegiatan maupun tahun yang sudah berjalan. 2. Kurangnya data (hardcopy / softcopy) jika terjadi pemeriksaan baik dari internal Kemenkumham maupun intansi terkait pemeriksaan. 3. Menghambat penyusunan laporan penataan 4. Menghambat dalam pengisian/download softcopy pada layanan web bphn.go.id 5. Menghambat dalam inventarisir hardcopy laporan kegiatan	BPHN dan Kementerian	Nota Dinas Teguran	Data/laporan hasil kegiatan tidak lengkap/tidak sesuai RKAKL	

		Dokumen Laporan kinerja belum lengkap	Laporan Kinerja tidak akuntabel	Sekretariat BPHN	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	Internal	C	Penilaian SAKIP menjadi rendah	BPHN dan Kementerian	penerapan permenpan	Laporan Kinerja tidak akuntabel	
7	Tersusunnya dokumen rencana Program dan Anggaran Yang Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak berbasis outcome	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	Sekretariat BPHN	Orientasi penyerapan anggaran	Internal	C	Kinerja tidak tercapai	BPHN dan Kementerian	evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	
			Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	Sekretariat BPHN	Berkurangnya nilai pagu alokasi	Eksternal	UC	Penyesuaian kinerja/outcome	BPHN dan Kementerian	ABT dan APBN-P	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko

: SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan

: 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kehilangan data sebagian kecil pegawai	Moderat	3	Masih terjadi kehilangan fisik data pegawai	Seluruh pegawai (BPHN)	2	6	Biru
2	kehilangan data seluruh pegawai	Sangat kecil	1	Resiko terjadi bencana sangat kecil namun tetap ada	BPHN dan Kementerian	5	5	Hijau
3	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Pasti	5	Pada saat banyak pegawai mengakses, aplikasi SIMPEG sangat lambat terutama pada saat akhir masa penghutangan tunkir dan penarikan data tunkir	Seluruh pegawai (BPHN)	2	10	Biru
4	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Moderat	3	Masih ada peraturan yang kurang/belum tersosialisasikan	BPHN	4	12	kuning
5	Penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terlambat dilaksanakan	Hampir Pasti	4	Terlambatnya penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terjadi karena kurang koordinasinya antar tim penilai	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan (UNIT ESELON I)	4	16	Oranye
6	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	Pasti	5	Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan kompetensinya	BPHN dan Kementerian	5	25	Merah
7	kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Hampir Pasti	4	Masih terdapat kesalahan penginputan data dalam penulisan usul angka kredit jabatan fungsional	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan (UNIT ESELON I)	4	16	Oranye
8	Pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Moderat	3	Masih ada pejabat yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	BPHN dan Kementerian	5	15	Kuning
9	SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun terlambat diterima	Moderat	3	Masih ada keterlambatan SK KP dan Pensiun	Pegawai yang bersangkutan (BPHN)	1	3	Biru
10	Terdapat selisih antara laporan BMN dengan laporan keuangan	moderat	3	Realisasi belanja sudah muncul di keuangan, namun jenis dan jumlah barang belum tercatat di BMN	Kementerian	5	15	Kuning

11	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	Pasti	5	setiap kali terjadi pemadaman listrik dan generator cadangan tidak dapat difungsikan secara maksimal maka kegiatan perkantoran tidak dapat dilaksanakan	BPHN	4	20	Orange
12	Penumpukan barang rusak berat	Pasti	5	Proses persetujuan penghapusan yang memakan waktu lama	Kementerian	5	25	Merah
13	adanya pemberitaan yang berbeda	Moderat	3	kemungkinan pemberitaan yang berbeda sangat mungkin terjadi namun kemungkinan substansi beritanya sama juga sama besar kemungkinannya	BPHN	4	12	Kuning
14	data kerja sama tidak akurat	Moderat	3	meski tidak selalu terjadi ketidakakuratan data namun kondisi ini sering terjadi	BPHN	4	12	Kuning
15	tidak tertibnya administrasi persuratan	Moderat	3	sebagian besar administrasi persuratan sudah ditertibkan	BPHN	4	12	Kuning
16	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Moderat	3	proses pensistematisasi masih terus dilakukan namun tetap saja terjadi kekurangan dalam pengklasifikasian dan penyimpanan arsip	Kementerian	5	15	Kuning
17	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Moderat	3	masih terdapat sistem persuratan yang dilakukan secara manual/konvensional	Kementerian	5	15	Kuning
18	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	Moderat	3	Tidak bisa dipastikan dalam pemeriksaan BPK tidak ditemukan penyimpangan keuangan negara	Kementerian	5	15	Kuning
19	Kurangnya koordinasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	Moderat	3	Koordinasi tetap dilakukan tetapi intensitas yang kurang	Kementerian	5	15	Kuning
20	Terjadinya pagu minus pada anggaran belanja pegawai	Pasti	5	Setiap tahun anggaran terjadi pagu minus Belanja Pegawai	Kementerian	5	25	Merah
21	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Moderat	3	Ralat SPM/SP2D tetapi tidak sering dilakukan	BPHN	4	12	Kuning
22	Keterlambatan revolving penggunaan Uang Persediaan	Moderat	3	Keterlambatan <i>revolving</i> tidak selalu terjadi	BPHN	4	12	Kuning

23	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Pasti	5	Ralat SPM/SP2D selalu dilakukan	BPHN	4	20	Orange
24	Revisi halaman III DIPA	Pasti	5	Setiap triwulan dilakukan revisi halaman III DIPA	Kementerian	5	25	Merah
25	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	Moderat	3	informasi yang ditampilkan tidak selalu update	Kementerian	5	15	Kuning
26	Pemanfaatan penggunaan system teknologi informasi thd kegiatan tidk banyak	Hampir Pasti	4	metode kerja lebih banyak menggunakan sistem manual/konvensional	BPHN	4	16	Orange
27	Data/laporan hasil kegiatan tidak lengkap/tidak sesuai RKAKL	Hampir Pasti	4	detail laporan yang diberikan pelaksana kegiatan tidak cukup mewakili kebutuhan penyusunan laporan unit	BPHN	4	16	Orange
28	Laporan Kinerja tidak akuntabel	Moderat	3	nilai laporan tidak konsisten, bisa baik bisa juga buruk	Kementerian	5	15	Kuning
29	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	Moderat	3	tidak seluruh dokumen rencana anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	Kementerian	5	15	Kuning
30	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	Pasti	5	perubahan kebijakan selalu terjadi	Kementerian	5	25	Merah

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. ...

INDIKATOR RESIKO						
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL : 2020				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Kehilangan data sebagian kecil pegawai	6	28	4	Kelalaian	200
2	kehilangan data seluruh pegawai	5	29	4	bencana	200
3	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	10	26	8	Load server simpeg tinggi	240
4	Peraturan baru kurang disosialisasikan	12		4	pembina kepegawaian responsif terhadap perubahan kebijakan kepegawaian serta kurang koordinasi terkait dengan penerapan kebijakan kepegawaian	250
5	Penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terlambat dilaksanakan	16	9	12	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	150
6	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	25	2	20	kurangnya pengetahuan pengelola kepegawaian terkait proses analisis kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan pegawai	200
7	kesalahan penginputan data dalam penilaian Usulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	16	8	12	kelalaian	200
8	Pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	15	4	12	keterbatasan SDM	150
9	SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun terlambat diterima	6	30	4	lambatnya usulan dan berkas yang diajukan dari pegawai tidak lengkap	200
10	Terdapat selisih antara laporan BMN dengan laporan keuangan	15	16	10	Data yang akan diinput/dentryr belum diterima	1
11	Kegiatan pemertanzen tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	20	7	16	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	1
12	Penumpukan barang rusak berat	25	5	10	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru ditransfer ke Kementerian Keuangan/KPKN	1
13	adanya pemberitaan yang berbeda	15	25	12	pusat-pusat di lingkungan BPHN mempunyai media publikasi sendiri-sendiri	1
14	data kerja sama tidak akurat	15	24	12	Kurangnya koordinasi pusat-pusat dalam hal kerja sama	1
15	tidak terbrya administrasi persuratan	15	23	12	Pemahaman Tata kelola Persuratan yang masih kurang	1
16	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	15	18	12	pemahaman kearsipan yang masih kurang	1
17	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	6	17	4	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	1
18	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	15	13	10	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akurat	1
19	Kurangnya koordinasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	15	19	12	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	1
20	Terjadinya pagu minus pada anggaran belanja pegawai	25	4	20	Perhitungan Anggaran pada Aplikasi GPP tidak bisa memprediksi keperluan Belanja Pegawai tahun berikutnya	1
21	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	12	6	8	Kesalahan penginputan nominal lebih/ kurang pada aplikasi	1
22	Keterlambatan revolving penggunaan Uang Persediaan	6	7	4	Kelidakpatuhan Pelaksana Kegiatan terhadap SOP Pertanggungjawaban	1
23	Terhambatnya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	20	21	15	Aplikasi SAS tidak userfriendly Kelalaian penginputan akun pada aplikasi	1 1
24	Revisi halaman III DIPA	25	3	20	Benubahnya jadwal kegiatan	1
25	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	15	20	12	website BPHN tidak update terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BPHN	2
26	Pemanfaatan penggunaan system teknologi informasi tnd kegiatan tdk beryak	16	11	12	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	2
27	Data/laporan hasil kegiatan tidak lengkap/tidak sesuai RKAKL	16	10	12	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	2
28	Laporan Kinerja tidak akurat	15	15	12	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	2
29	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	15	14	12	Orientasi penyerapan anggaran	2
30	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	25	1	20	Berkurangnya nilai pagu alokasi	2

Kecala Satker X

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL : 2021							
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelalaian	200	Mengurangi Risiko	Melakukan scanning data Updating Data	Jumlah data yang di scan Jumlah data update	3	Agustus, September, Oktober	Sekretariat BPHN	-
2	bencana	200	Mengurangi Risiko	Melakukan scanning data	Jumlah data yang di scan	3	Agustus, September, Oktober	Sekretariat BPHN	-
3	Load server simpeg tinggi	240	Mengurangi Risiko	Mengusulkan penambahan <i>bandwidth</i> internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kapasitas <i>bandwidth</i> internet	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
4	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	#REF!	Mengurangi Risiko	Menginformasikan kepada TU masing-masing	Laporan surat tugas	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
5	kurang responsif	#REF!	Mengurangi Risiko	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
6	kurang koordinasi	250	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
7	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	150	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
8	kurangnya pengetahuan pengelola kepegawaian terkait proses analisis kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan pegawai	200	Mengurangi Risiko	Bimtek Analis Kebutuhan Diklat	Pengelola Kepegawaian yang telah melaksanakan Bimtek Analisis Kebutuhan Diklat	2	Januari s.d. Februari	Sekretariat BPHN	-
9	kelalaian	200	Mengurangi Risiko	Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional secara aplikasi	Aplikasi Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
10	keterbatasan SDM	150	Mengurangi Risiko	Melakukan assessment terhadap seluruh pegawai	Dokumen Kesenjangan Kompetensi	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
11	lambatnya usulan dan berkas yang diajukan dari pegawai tidak lengkap	200	Mengurangi Risiko	digitalisasi dokumen pegawai dan pemahaman kepada pegawai untuk menyamakan persepsi dalam hal kelengkapan dokumen, apabila pegawai memiliki data terbaru segera disampaikan ke bagian kepegawaian untuk diproses digitalisasi	Jumlah data yang diupdate	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
12	Data yang akan diinput/dientry belum diterima	1	Mengurangi Risiko	Rapat koordinasi	Koordinasi dengan bagian terkait	2	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
13	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	1	Mengurangi Risiko	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-
14	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL	1	Mengurangi Risiko	Melakukan follow up ke biro pengelolaan BMN	Koordinasi dengan instansi terkait	2	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
15	pusat-pusat dilingkungan BPHN mempunyai media publikasi sendiri-sendiri	1	Mengurangi Risiko	Rapat koordinasi	Rapat Koordinasi	11	Februari s.d Desember	sekretariat BPHN	-
16	Kurangnya koordinasi pusat-pusat dalam hal kerja sama	1	Mengurangi Risiko	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi	11	Februari s.d Desember	sekretariat BPHN	-
17	Pemahaman Tata kelola Persuratan yang masih kurang	1	Mengurangi Risiko	sosialisasi tata kelola persuratan	pencatatan penomoran yang sesuai dengan klasifikasi penomoran	12	Januari s.d. Desember	sekretariat BPHN	-
18	pemahaman kearsipan yang masih kurang	1	Mengurangi Risiko	sosialisasi tata kelola kearsipan	pengelompokan arsip sesuai dengan klasifikasi pengarsipan	12	Januari s.d. Desember	sekretariat BPHN	-
19	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	1	Mengurangi Risiko	sosialisasi sisumaker	penggunaan sisumaker secara aktif	12	Januari s.d. Desember	sekretariat BPHN	-
20	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Peningkatan kualitas rekonsiliasi data Laporan Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	2	Juli dan November	Sekretariat BPHN	-
21	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan	Catatan Hasil Reviu	2	Agustus dan Desember	Sekretariat BPHN	-
22	Perhitungan Anggaran pada Aplikasi GPP tidak bisa memprediksi keperluan Belanja Pegawai tahun berikutnya	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan	Dokumen rencana belanja pegawai	1	Februari	Sekretariat BPHN	-
23	Kesalahan penginputan nominal lebih/ kurang pada aplikasi	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	Maret, Juni, September, Desember	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Ketidakpatuhan Pelaksana Kegiatan terhadap SOP Pertanggungjawaban	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Rapat koordinasi internal dengan Kasub TU dan/atau pelaksana kegiatan	Laporan hasil koordinasi	11	Februari s.d Desember	Sekretariat BPHN	-
25	Kelalaian penginputan akun pada aplikasi	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	Maret, Juni, September, Desember	Sekretariat BPHN	-
26	Berubahnya jadwal kegiatan	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Monitoring dan evaluasi kalender pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	4	Maret, Juni, September, Desember	Sekretariat BPHN	-
27	Berubahnya jadwal kegiatan	2	Mengurangi Risiko Mengalihkan Resiko	1. Laporan Service Level Agreement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinu	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2	September, Desember	Sekretariat BPHN	-
28	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	2	Mengurangi Risiko	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Standar Operating Prosedur	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-
29	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	2	Mengurangi Risiko	Nota Dinas Teguran	Standar Operating Prosedur	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-
30	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	2	Mengurangi Risiko	Internalisasi permenpan tentang dan bintek penyusunan/penyajian laporan	Dokumen pelaksanaan internalisasi dan bintek	2	Oktober- desember	Sekretariat BPHN	-
31	Orientasi penyerapan anggaran	2	Mengurangi Risiko	Penyusunan anggaran berbasis kinerja	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	2	Februari, Agustus	Sekretariat BPHN	-
32	Berkurangnya nilai pagu alokasi	2	Mengurangi Risiko	Mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang belum terpenuhi	Usulan anggaran pelaksanaan kegiatan	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan scanning data Updating Data	Jumlah data yang di scan Jumlah data update	3	2	66,67	Kelalaian	3	2	66,67		
2	Melakukan scanning data	Jumlah data yang di scan	3	2	66,67	bencana	3	2	66,67		
3	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kapasitas bandwidth internet	12	9	75,00	Load server simpeg tinggi	12	9	75,00		
4	Menginformasikan kepada TU masing-masing	Laporan surat tugas	12	9	75,00	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	12	9	75,00		
5	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	9	75,00	kurang responsif	12	9	75,00		
6	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	9	75,00	kurang koordinasi	12	9	75,00		
7	Meningkatkan koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait	12	9	75,00	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	12	9	75,00		
8	Bimtek Analis Kebutuhan Diklat	Pengelola Kepegawaian yang telah melaksanakan Bimtek Analisis Kebutuhan Diklat	1	0	0,00	kurangnya pengetahuan pengelola kepegawaian terkait proses analisis kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan pegawai	1	0	0,00		
9	Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional secara aplikasi	Aplikasi Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional	12	9	75,00	kelalaian	12	9	75,00		
10	Melakukan assesment terhadap seluruh pegawai	Dokumen Kesenjangan Kompetensi	12	9	75,00	keterbatasan SDM	12	9	75,00		
11	digitalisasi dokumen pegawai dan pemahaman kepada pegawai untuk menyamakan persepsi dalam hal kelengkapan dokumen, apabila pegawai memiliki data terbaru segera disampaikan ke bagian kepegawaian untuk diproses digitalisasi	Jumlah data yang diupdate	12	9	75,00	lambatnya usulan dan berkas yang diajukan dari pegawai tidak lengkap	12	9	75,00		
12	Rapat koordinasi	Koordinasi dengan bagian terkait	2	1	50	Data yang akan diinput/dientry belum diterima	1	1	100,00	0	
13	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1		0	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	1				
14	Melakukan follow up ke biro pengelolaan BMN	Koordinasi dengan instansi terkait	2	1	50	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL	1	1	100,00	0,00	
15	Rapat koordinasi	Rapat Koordinasi	12			pusat-pusat dilingkungan BPHN mempunyai media publikasi sendiri-sendiri	0				
16	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi	2			Kurangnya koordinasi pusat-pusat dalam hal kerja sama	0				
17	sosialisasi tata kelola persuratan	pencatatan penomoran yang sesuai dengan klasifikasi penomoran	2			Pemahaman Tata kelola Persuratan yang masih kurang	0				
18	sosialisasi tata kelola kearsipan	pengelompokan arsip sesuai dengan klasifikasi pengarsipan	1			pemahaman kearsipan yang masih kurang	0				
19	sosialisasi sisumaker	penggunaan sisumaker secara aktif	4			pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	0				
20	Peningkatan kualitas rekonsiliasi data Laporan Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	2	1	50	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akurat	1				
21	Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan	Catatan Hasil Reviu	2	1	50	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	1				
22	Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan	Dokumen rencana belanja pegawai	1	1	100	Perhitungan Anggaran pada Aplikasi GPP tidak bisa memprediksi keperluan Belanja Pegawai tahun berikutnya	1				
23	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	3	75	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	1				

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
24	Rapat koordinasi internal dengan Kasub TU dan/atau pelaksana kegiatan	Laporan hasil koordinasi	11	7	64	Ketidakpatuhan Pelaksana Kegiatan terhadap SOP Pertanggungjawaban	1				
25	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	3	75	Kelalaian penginputan akun pada aplikasi	1				
26	Monitoring dan evaluasi kalender pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	4	3	75	Berubahnya jadwal kegiatan	1				
27	1. Laporan Service Level Agreement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2			Berubahnya jadwal kegiatan	2				
28	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Standar Operating Prosedur	1			System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	2				
29	Nota Dinas Teguran	Standar Operating Prosedur	1			Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	2				
30	Internalisasi permenpan tentang dan bintek penyusunan/pennyajian laporan	Dokumen pelaksanaan internalisasi dan bintek	2			data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	2				
31	Penyusunan anggaran berbasis kinerja	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	2			Orientasi penyerapan anggaran	2				
32	Mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang belum terpenuhi	Usulan anggaran pelaksanaan kegiatan	1			Berkurangnya nilai pagu alokasi	2				

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Prioritas Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang Dijadikan Dasar penyusunan RUU	Tersusunnya dokumen program legislasi (UU, PP dan Perpres) dan terlaksananya fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan	Capaian Prolegnas, Progsun PP/Perpres, tidak sesuai dengan perencanaan.
			Tersusunnya Naskah Akademik yang dapat memenuhi kebutuhan penyusunan Rancangan Undang-Undang (sesuai lampiran II)	Naskah akademik yang dihasilkan belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penormaam
			Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan	Jumlah surat keterangan penyelarasan naskah akademik yang diterbitkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
				RUU mengalami perubahan materi setelah penyelarasan NA

Jakarta
 Kepala Satker X

XYZ
 NIP. --

Lampiran Keputusan Kepala
 Satker X
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : **PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL**

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko		
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Tersusunnya dokumen program legislasi (UU, PP dan Perpres) dan terlaksananya fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan	Capaian Prolegnas, Progsun PP/Perpres, tidak sesuai dengan perencanaan.	Capaian Prolegnas, Progsun PP/Perpres belum sesuai dengan target yang direncanakan.	Pusren	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	Eksternal	UC	1) PUU yang membutuhkan peraturan pelaksana tidak efektif berjalan karena peraturan teknisnya tidak segera disahkan. 2) Penganggaran penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres tidak efisien.	BPHN dan Kementerian	Mengadakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan	Ada beberapa UU, PP, atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu.			
			Fasilitasi Prolegda yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh daerah	Pusren	Fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif. (pelibatan kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah)	Internal dan Eksternal	UC	Kebijakan penyusunan Prolegda belum sesuai dengan kebijakan perencanaan di tingkat pusat	BPHN, Kantor Wilayah dan Pemda	Mengadakan Koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Pemda	masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi prolegda oleh Kemenkumham			
2	Tersusunnya Naskah Akademik yang dapat memenuhi kebutuhan penyusunan Rancangan Undang-Undang (sesuai lampiran II)	Naskah akademik yang dihasilkan belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penorma	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	Pusren	data hasil penelitian/pengkajian terbatas.	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya penyusunan undang-undang	BPHN dan Kementerian	Penerapan SOP secara ketat	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU			
3	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselarskan	Jumlah surat keterangan penyalarskan naskah akademik yang diterbitkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	naskah akademik yang dimohonkan penyalarskan tidak mencapai target yang ditetapkan	Pusren	Penyalarskan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Jika tidak ada pemrakarsa yang mengajukan permohonan maka kegiatan penyalarskan tidak dilakukan	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya penyusunan undang-undang	BPHN dan Kementerian	Penerapan SOP secara ketat	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU			
			target waktu pelaksanaan penyalarskan tidak tercapai	Pusren	Pemrakarsa kurang memiliki komitmen terhadap percepatan pelaksanaan penyalarskan	Eksternal	UC	memperlambat penyelesaian penyalarskan		status quo	naskah akademik yang dimohonkan penyalarskan tidak mencapai target yang ditetapkan	target waktu pelaksanaan penyalarskan tidak tercapai		
			RUU mengalami perubahan materi setelah penyalarskan NA	Pusren	perubahan kebijakan pemerintah	Eksternal	UC	penyusunan laporan dilakukan tidak hanya sekali	BPHN	penyempurnaan NA dengan prosedur Penyalarskan ulang dan penyempurnaan NA tanpa penyalarskan kembali		Menyalarskan isi NA sesuai dengan RUU		
			penyalarskan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR	Pusren	adanya pemahaman bahwa NA harus sesuai dengan muatan RUU	Internal dan Eksternal	C dan UC	tetap melakukan perbaikan NA jika Kemenkumham adalah Pemrakarsa	BPHN	pengampu kegiatan melakukan proses perbaikan NA		penyalarskan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR		

Jakarta,

Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: **PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL**
: **2021**

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Ada beberapa UU, PP, atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu.	Hampir Pasti	4	UU, PP atau Perpres melibatkan K/L terkait sebagai pemrakarsa	Kementerian	5	20	Orange
2	masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi prolegda oleh Kemenkumham	Hampir Pasti	4	Keterlibatan Kanil dalam Penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah	Kementerian	5	20	Orange
3	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	Moderat	3	cukup terdapat kemungkinan NA tidak tersedia sebagai bahan penyusunan RUU	Kementerian	5	15	Kuning
4	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	Kecil	2	karena kegiatan penyelarasan dilakukan berdasarkan atas permohonan dari K/L yang masuk	Kementerian	5	10	Biru
5	naskah akademik yang dimohonkan penyelarasan tidak mencapai target yang ditetapkan	Hampir Pasti	4	karena kegiatan penyelarasan dilakukan berdasarkan atas permohonan dari K/L yang masuk	Kementerian	5	20	Orange

6	target waktu pelaksanaan penyeselarasan tidak tercapai	kecil	2	pemrakarsa yang kurang komitmen dengan kegiatan penyeselarasan sehingga kegiatan penyeselarasan melebihi dari target waktu yang ditentukan	Kementerian	5	10	biru
7	Menyeselaraskan isi NA sesuai dengan RUU	Hampir Pasti	4	karena kegiatan penyeselarasan yang biasanya paralel dengan kegiatan harmonisasi	Kementerian	5	20	Orange
8	penyeselarasan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR	kecil	2	penyeselarasan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR dilakukan guna memberikan informasi yang sesuai dengan pembahasan RUU tetapi tidak semua kegiatan penyeselarasan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR	Kementerian	5	10	Biru

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

INDIKATOR RESIKO						
Unit Pemilik Risiko		: PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL				
Periode Penerapan		: 2020				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Ada beberapa UU, PP, atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu	20	2	10	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	10
2	Masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi Prolegda oleh Kemenkumham	20	2	10	Fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif. (Keterlibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah)	10
3	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	15	2	12	data hasil penelitian/pengkajian terbatas.	1
4	Tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	10			lamanya penetapan pilihan kebijakan serta konfirmasi pilihan materi yang dituangkan dalam NA	1
5	naskah akademik yang dimohonkan penyelarasan tidak mencapai target yang ditetapkan	20	4	12	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Jika tidak ada pemrakarsa yang mengajukan permohonan maka kegiatan penyelarasan tidak dilakukan	5
6	target waktu pelaksanaan penyelarasan tidak tercapai	10	1	8	Pemrakarsa kurang memiliki komitmen terhadap percepatan pelaksanaan penyelarasan	5
7	Menyelaraskan isi NA sesuai dengan RUU	20	3	12	perubahan kebijakan pemerintah	5
8	penyelarasan dilakukan sampai tahap pengesahan RUU di DPR	10	5	0	adanya pemahaman bahwa NA harus sesuai dengan muatan RUU	5

Kepala Satker X

XYZ

NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	10	Mengurangi	Menambah frekuensi rapat koordinasi	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2	Januari s.d Desember	Pusren	-
				Meningkatkan kapasitas SDM di bidang terkait	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2			
				Melakukan studi banding ke negara lain	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2			
2	Fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif. (Keterlibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah)	10	Mengurangi	Menambah frekuensi rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Pemda	Jumlah rapat koordinasi	6	Maret, Desember	Pusren	-
3	data hasil penelitian/pengkajian terbatas.	1	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam NA dan unit penelitian/pengkajian	Laporan rapat koordinasi	2	Januari , Maret	Pusren	-
				Melaksanakan uji publik dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan kegiatan uji publik NA	2	Januari , Maret	Pusren	-
4	lamanya penetapan pilihan kebijakan serta konfirmasi pilihan materi yang dituangkan dalam NA	1	Mengurangi Risiko	Melakukan penambahan anggaran melalui ABT, dan lain-lain	Jumlah perubahan anggaran (ABT)	2	Juli, Oktober	Pusren	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Jika tidak ada pemrakarsa yang mengajukan permohonan maka kegiatan penyelarasan tidak dilakukan	5	Mengurangi Risiko	Melakukan usulan perubahan ADK	Jumlah usulan ADK	2	Juli, Oktober	Pusren	-
6	Pemrakarsa kurang memiliki komitmen terhadap percepatan pelaksanaan penyelarasan	5	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi/pendampingan secara intens dengan pemrakarsa	Jumlah rapat koordinasi	60	Januari s.d Desember	Pusren	-
7	perubahan kebijakan pemerintah	5	Mengurangi Risiko	Melakukan rapat koordinasi dengan pemrakarsa sesuai dengan kebijakan pemerintah	Jumlah rapat koordinasi	60	Januari s.d Desember	Pusren	-
8	adanya pemahaman bahwa NA harus sesuai dengan muatan RUU	5							-

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Menambah frekuensi rapat koordinasi	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2	7	35,00	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	10	2	17,50	8,30	
2	Meningkatkan kapasitas SDM di bidang terkait	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2	2	100,00	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	1	
3	Melakukan studi banding ke negara lain	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	2	2	100,00	Dalam proses penyusunan, materi muatan RUU, RPP, atau Rperpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar Kementerian terkait.	1	
4	Menambah frekuensi rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Pemda	Jumlah rapat koordinasi	6	Facilitasi program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif. (Keterlibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah)	0	
5	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam NA dan unit penelitian/penkajian	Laporan rapat koordinasi	2		0	
6	Melaksanakan uji publik dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan kegiatan uji publik NA	2	data hasil penelitian/penkajian terbatas.	0	
9	Melakukan penambahan anggaran melalui ABT, dan lain-lain	Jumlah perubahan anggaran (ABT)	2			lamanya penetapan pilihan kebijakan serta konfirmasi pilihan materi yang dituangkan dalam NA	5				
10	Melakukan usulan perubahan ADK	Jumlah usulan ADK	2			Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Jika tidak ada pemrakarsa yang mengajukan permohonan maka kegiatan penyelarasan tidak dilakukan	5				
	Melakukan koordinasi/pendampingan secara intens dengan pemrakarsa	Jumlah rapat koordinasi	60			Pemrakarsa kurang memiliki komitmen terhadap percepatan pelaksanaan penyelarasan					
	Melakukan rapat koordinasi dengan pemrakarsa sesuai dengan kebijakan pemerintah	Jumlah rapat koordinasi	0			perubahan kebijakan pemerintah					
0		0				adanya pemahaman bahwa NA harus sesuai dengan muatan RUU					

Jakarta,
 Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko		: PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL		
Periode Penerapan		: 2021		
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum Dengan Tersedianya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN	Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam sistem jaringan informasi hukum nasional Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional	Belum seluruhnya Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik

Jakarta

Kepala Satker X

XYZ

NIP. --

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam sistem jaringan informasi hukum nasioal	Belum seluruhnya Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi	Kurangnya pemahaman Anggota terkait JDIH dan tindaklanjut dalam pengelolaannya	Pusat DJIHN	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	Internal, Eksternal	C	pengelolaan dan pengintegrasian JDIH terhambat	Pusat DJIHN, Anggota JDIH dan Masyarakat	PERPRES No.33 Tahun 2012	Kurangnya pemahaman Anggota terkait JDIH dan tindaklanjut dalam pengelolaannya	Resiko Kebijakan
			Kebijakan Pimpinan kurang mendukung JDIH	Pusat DJIHN	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungkannya	Internal, Eksternal	C	JDIHN belum terwujud	Pusat DJIHN, Anggota JDIH dan Masyarakat	PERPRES No.33 Tahun 2012	Kebijakan Pimpinan kurang mendukung JDIH	Resiko Kebijakan
			Belum terwujudnya Database Hukum Nasional /	Pusat DJIHN	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	Internal, Eksternal	C	belum semua Database Anggota JDIH terintegrasi	Pusat DJIHN, Anggota JDIH dan Masyarakat	Standar dan Teknis Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum	Belum terwujudnya Database Hukum Nasional /	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
2	Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional	Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum	Pusat DJIHN	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	Internal	C	Pencarian informasi dan dokumen hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	SOP dan Reviu	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
			Belum dilakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan	Pusat DJIHN	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	Internal	C	Masyarakat kesulitan mendapatkan peraturan perundang-undangan secara cepat	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	SOP	Belum dilakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan	Resiko Operasional
			Belum adanya Database Dokumen Hukum yang lengkap	Pusat DJIHN	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	Internal	C	Pencarian informasi dan dokumen hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Diklat dan Kerjasama (Kegiatan Penguatan SDM baik dalam bentuk seminar, asistensi atau kegiatan lainnya yang bersifat membantu peningkatan kualitas SDM dalam mengelola dokumen hukum)	Belum adanya Database Dokumen Hukum yang lengkap	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
			Perangkat Pendukung Pengolahan dokumen dan informasi hukum belum cukup memadai	Pusat DJIHN	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Internal	C	Pemberian Pelayanan Dokumen dan Informasi Hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Realisasi terkait Penganggaran Pembelian Perangkat Pendukung setiap tahunnya sesuai dengan Kebutuhan	Perangkat Pendukung Pengolahan dokumen dan informasi hukum belum cukup memadai	Resiko Kebijakan
			Pengadaan Koleksi Dokumen Hukum belum sesuai dengan kebutuhan	Pusat DJIHN	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	Internal, Eksternal	C	Koleksi Dokumen Hukum yang dilyankan belum optimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Mekanisme Pembelian Koleksi dibuat per satuan kegiatan bukan paket (memperbaiki mekanisme pembelian koleksi)	Pengadaan Koleksi Dokumen Hukum belum sesuai dengan kebutuhan	Resiko Operasional

Jakarta,

Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko

: PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan

: 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kurangnya pemahaman Anggota terkait JDIH dan tindaklanjut dalam pengelolaannya	Pasti	4	masih banyak anggota JDIH yang belum tahu dan memahami Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Kementerian	5	20	Orange
2	Kebijakan Pimpinan kurang mendukung JDIH	Pasti	4	masih banyak pimpinan di instansi/anggota JDIH yang belum memahami pentingnya JDIH sehingga tidak menjadikan JDIH atau bidang yang mengelola dokumentasi sebagai prioritas dan mengalokasikan anggaran yang minim untuk pengelolaannya	Kementerian	5	20	Orange
3	Belum terwujudnya Database Hukum Nasional /	Hampir Pasti	4	masih banyak anggota JDIH yang belum memiliki website JDIH (sistem pengelolaan dokumen hukum) dan belum terintegrasinya website JDIH anggota dengan website JDIHN Pusat (jdihn.go.id) akibat pengeolalaan dokumen hukum yang belum sesuai dengan standar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 serta sulitnya berkoordinasi dengan dinas Kominfo daerah/instansi	Kementerian	5	20	Orange
4	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum	Moderat	3	masih banyak dokumen hukum yang berbentuk hardcopy dan belum dilakukan digitalisasi untuk disajikan dalam website JDIH	Kementerian	5	15	Kuning
5	Belum dilakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan	Moderat	3	masih banyak dokumen hukum yang belum terinventarisasi dengan baik	Kementerian	5	15	Kuning

6	Belum adanya Database Dokumen Hukum yang lengkap	Moderat	3	kurangnya SDM pengelola dokumentasi hukum	Kementerian	5	15	Kuning
7	Perangkat Pendukung Pengolahan dokumen dan informasi hukum belum cukup memadai	Moderat	3	sarana prasarana (komputer PC, laptop, alat scanning dan jaringan internet) yang kurang memadai di ruang kerja untuk mendukung pengelolaan dokumentasi hukum	Kementerian	5	15	Kuning
8	Pengadaan Koleksi Dokumen Hukum belum sesuai dengan kebutuhan	Moderat	3	terbatasnya dokumen hukum yang ada pada penyedia sehingga koleksi dokumen hukum yang dilayankan belum optimal dan belum bisa memenuhi kebutuhan dokumen hukum yang dicari oleh pengunjung/pemustaka	Unit Eselon I	4	12	Kuning

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

INDIKATOR RESIKO						
Unit Pemilik Risiko		: PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL				
Periode Penerapan		: 2020				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurangnya pemahaman Anggota terkait JDIH dan tindaklanjut dalam pengelolaannya	20	3	12	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	3
2	Kebijakan Pimpinan kurang mendukung JDIH	20	1	12	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungkannya	34
3	Belum terwujudnya Database Hukum Nasional /	20	2	12	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8
4	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum	15	5	8	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	100
5	Belum dilakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan	15	4	8	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	15000
6	Belum adanya Database Dokumen Hukum yang lengkap	15	6	8	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	10
7	Perangkat Pendukung Pengolahan dokumen dan informasi hukum belum cukup memadai	15	7	8	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	1

8	Pengadaan Koleksi Dokumen Hukum belum sesuai dengan kebutuhan	12	8	4	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	2
---	---	----	---	---	--	---

Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko		: PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL							
Periode Penerapan		: 2021							
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	3	Mengurangi Risiko	Memperluas media sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	media sosialisasi (facebook, twitter, youtube, instagram, line, whatsapp)	6	Februari s.d. November	Pusat DJIHN	-
2	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungkannya	34	Mengurangi Risiko	Meningkatkan Koordinasi	Koordinasi (koordinasi dilakukan melalui forum kegiatan, surat menyurat, korespondensi telp, undangan APEC. Exclude K/L/LPNK)	34	Februari s.d. November	Pusat DJIHN	-
3	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8	Mengurangi Risiko	Menyelenggarakan Bimtek/Pendampingan di 8 Provinsi mengenai Standar Teknis dan Standar Metadata Website JDIH serta Pengintegrasian dengan website JDIHN Pusat	Laporan Hasil Bimtek/Pendampingan	8	Februari s.d. November	Pusat DJIHN, BPSDM, Kanwil	-
4	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	100	Mengurangi Risiko	Melakukan program digitalisasi dokumen hukum	dokumen hukum	200	Jan s.d. Desember	Pusat DJIHN	-
5	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	15000	Mengurangi Risiko	Melakukan inventarisasi database perundang-undangan	hasil inventarisasi	30000	Jan s.d. Desember	Pusat DJIHN	-
6	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	10	Mengurangi Risiko	Melakukan pelatihan pengelolaan dokumen hukum	pengelola dokumen hukum yang berkualitas	12	Jan s.d. Desember	Pusat DJIHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	1	Mengurangi Risiko	Melakukan pengusulan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Pengadaan Perangkat (PC untuk Pelayanan dan Pengolahan, Mesin fotocopy, printer dan Scanner, wifi dan akses internet untuk pengunjung, fasilitas ruang koleksi dan baca seperti; ac, furniture, pengatur suhu ruangan, rak buku, dll)	1	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	-
8	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	2	Mengurangi Risiko	Memperbaiki mekanisme pembelian pengadaan koleksi dokumen hukum	Penambahan jumlah volume paket pembelian	12	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	-

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Memperluas media sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	media sosialisasi (facebook, twitter, youtube, instagram, line, whatsapp)	6	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	3	
2	Meningkatkan Koordinasi	Koordinasi (koordinasi dilakukan melalui forum kegiatan, surat menyurat, korespondensi telp, undangan APEC. Exclude K/L/LPNK)	34	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungannya	34	
3	Menyelenggarakan Bimtek/Pendampingan di 8 Provinsi mengenai Standar Teknis dan	Laporan Hasil Bimtek/Pendampingan	8	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8	
4	Melakukan program digitalisasi dokumen hukum	dokumen hukum	200	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	100	
5	Melakukan inventarisasi database perundang-undangan	hasil inventarisasi	30000	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	15000	
6	Melakukan pelatihan pengelolaan dokumen hukum	pengelola dokumen hukum yang berkualitas	12	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	10	
7	Melakukan pengusulan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Pengadaan Perangkat (PC untuk Pelayanan dan Pengolahan, Mesin fotocopy, printer dan Scanner, wifi dan akses internet untuk pengunjung, fasilitas ruang koleksi dan baca seperti; ac, furniture, pengatur suhu ruangan, rak buku, dll)	1	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	1	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
8	Memperbaiki mekanisme pembelian pengadaan koleksi dokumen hukum	Penambahan jumlah volume paket pembelian	12	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	2	

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko : PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM				
Periode Penerapan : 2021				
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Desa sadar hukum yang terbentuk belum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat
			Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Masih belum maksimalnya pelaksanaan penyuluhan hukum di masyarakat
			Jumlah JFT Penyuluh hukum yang terbentuk	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata di setiap pusat dan daerah
				Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi
			Jumlah Media Pemberdayaan masyarakat yang diproduksi	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan penyuluhan hukum
		Pembiayaan aplikasi penyuluh hukum belum tersedia		
Terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/Masyarakat Miskin	Jumlah Pengawasan pemberian bantuan dan penyaluran dana bantuan hukum diseluruh Kantor Wilayah	Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal		

Jakarta

Kepala Satker X

XYZ

NIP. --

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : **PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM**

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Desa sadar hukum yang terbentuk belum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	Pusluh	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	Internal/Eksternal	C	Desa sadar hukum yang dibentuk belum sesuai dengan kriteria yang berlaku	Kementerian dan Masyarakat	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	
					Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan					Melaksanakan kegiatan evaluasi		
2	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Masih belum maksimalnya pelaksanaan penyuluhan hukum di masyarakat	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata	Pusluh	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	Internal/Eksternal	C	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah	Kementerian dan Masyarakat	Memaksimalkan kegiatan penyuluhan hukum	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata	
					Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah							
3	Jumlah JFT Penyuluh hukum yang terbentuk	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk belum merata di setiap pusat dan daerah	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Pusluh	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	Internal	C	Jumlah Penyuluh Hukum belum memenuhi target kebutuhan	Kementerian dan Masyarakat	Pembentukan JFT Penyuluh hukum untuk pemenuhan formasi	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Risiko Kebijakan
		Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi teknis		Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum					Internal	C	Materi penyuluhan yang disampaikan belum optimal
4	Jumlah Media Pemberdayaan masyarakat yang diproduksi	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan penyuluhan hukum	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	Pusluh	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	Internal	C	Informasi penyuluhan hukum belum maksimal diterima oleh masyarakat	Kementerian dan Masyarakat	Penyediaan media pemberdayaan masyarakat	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	Risiko Kebijakan
		Pembiayaan aplikasi penyuluh hukum belum tersedia	Kurangnya content/materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan		Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum						Internal	C
5	Jumlah Pengawasan pemberian bantuan dan penyaluran dana bantuan hukum diseluruh Kantor Wilayah	Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	Pusluh	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	Internal	C	Hasil pengawasan belum efektif mendukung tindak lanjut perbaikan pelaksanaan bantuan hukum	Kementerian dan Masyarakat	Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	

Jakarta,
 Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
: 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	Moderat	3		Kementerian	5	15	Kuning
2	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata	Hampir Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange
3	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Hampir Pasti	4	kebutuhan formasi	Kementerian	5	20	Orange
4	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi teknis	Hampir Pasti	4	kebutuhan formasi	Kementerian	5	20	Orange
5	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	Hampir Pasti	4	Keterbatasan anggaran	Kementerian	5	20	Orange
6	Kurangnya content/materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan	Moderat	3		Kementerian	5	15	Kuning
7	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	Hampir Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
 Periode Penerapan : 2020

untuk dihide saat pelaporan

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
1	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	15	3	8	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	Karena dalam pembentukan desa sadar hukum harus melalui proses verifikasi berdasarkan SE Ka.BPHN No.PHN-HN.04.04-20 TAHUN 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan desa sadar hukum, selain itu harus memenuhi kriteria penilaian sesuai yang tercantum dalam SE Ka.BPHN No. PHN 05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.	10
		20	2	12	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan	Masih minimnya dukungan Pemerintah Daerah serta Stakeholder dalam mendukung kegiatan pembinaan kelompok KADARKUM, desa atau kelurahan binaan baik dari segi tenaga penyuluh hukum maupun anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan	10
2	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata	20	1	12	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	Masih minimnya dukungan Pemerintah Daerah serta Stakeholder dalam mendukung kegiatan pembinaan kelompok KADARKUM, desa atau kelurahan binaan baik dari segi tenaga penyuluh hukum maupun anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan	10
		20			Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah		
3	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	20		16	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	peningkatan kegiatan sosialisasi JF Penyuluh Hukum	50
4	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi teknis	15		12	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	Penguatan bagi penyuluh hukum yang existing dan program pembentukan JF PH penyuluh hukum melalui pelatihan	50
5	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	20		16	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	Pemanfaatan TI sebagai sarana pemberdayaan masyarakat	1000
6	Kurangnya content/materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan	#REF!			Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum		
7	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	20			Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum		

Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
 Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	10	Mengurangi Risiko	Melakukan kerja sama/MoU dengan Pemerintah Daerah / Stack holder	Kerja sama/MoU	1	Januari - Desember	Pusluh	-
2	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan	10	Mengurangi Risiko	Pembentukan/pengangkatan Penyuluh Hukum	Jumlah Penyuluh hukum	50	Januari - Desember	Pusluh	-
3	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	10	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan sosialisasi terkait JFT Penyuluh hukum	Jumlah Sosialisasi	33	Januari - Desember	Pusluh	-
4	Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah	0	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Januari - Desember	Pusluh	-
5	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	50	Mengurangi Risiko	Peningkatan produksi media pemberdayaan	Jumlah media cetak	10.000	Januari - Desember	Pusluh	-
6	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	50	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Januari - Desember	Pusluh	-
7	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	1000	Mengurangi Risiko	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan		Januari - Desember	Pusluh	-
8	Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum	100	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan sosialisasi pembentukan desa sadar hukum	Jumlah kegiatan peningkat	10	Januari - Desember	Pusluh	-
9	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	0	Mengurangi Risiko	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan	2	Januari - Desember	Pusluh	-

Jakarta,
 Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan kerja sama/MoU dengan Pemerintah Daerah / Stake holder	Kerja sama/MoU	1	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	10	
2	Pembentukan/pengangkatan Penyuluh Hukum	Jumlah Penyuluh hukum	50	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau keluarga hukum	10	
3	Pelaksanaan sosialisasi terkait JFT Penyuluh hukum	Jumlah Sosialisasi	33	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	10	
4	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah	0	
5	Peningkatan produksi media pemberdayaan	Jumlah media cetak	10000	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	50	
6	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	50	
7	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan	0	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	1000	
8	Pelaksanaan sosialisasi pembentukan desa sadar hukum	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	10	Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum	100	
9	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan	2	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	0	

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Koordinasi melalui Forum Tanggapan dan Forum Pemantauan	Laporan	1	1	100,00	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	1	1	100,00	0,00	Diisi dengan rekomendasi perbaikan
2	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Buku DPHN	1	1	100,0	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	1	1	100,00	0,00	

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum sebagai bahan kebijakan arah pembangunan hukum	Belum adanya komitmen K/L untuk memanfaatkan rekomendasi sebagai bahan perencanaan pembangunan hukum	Resistensi K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Pusat AE	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	Internal	C	Tidak tercapainya program penataan Regulasi nasional	Kementerian/Lem baga Pemerintah non Kementerian	Penyempurnaan Pedoman AE	Resistensi K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Resiko Kebijakan Hukum
2	Tersusunnya dokumen pembangunan hukum nasional	Belum adanya komitmen Bappenas untuk memanfaatkan DPHN sebagai bahan RPJMN	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	Pusat AE	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	Eksternal	UC	Tidak tercapainya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang berkualitas	Kementerian/Lem baga Pemerintah non Kementerian	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	Resiko Kebijakan

Jakarta,
 Kepala Satker X

XYZ
 NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
: 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Resistensi K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Kecil	2	Kecil kemungkinan pemangku kebijakan resisten terhadap rekomendasi	Kementerian	5	10	Kuning
2	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	Hampir Pasti	4	Sebagian besar belum dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	5	20	Kuning

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko

: PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Periode Penerapan

: 2020

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Resistensi K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	10	2	8	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	1
2	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	20	1	16	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	1

Kepala Satker X

XYZ

NIP. 19700429 199103 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satker X

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Satker X

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	1	Mengurangi Risiko	Koordinasi melalui Forum Tanggapan dan Forum Pemantauan	Laporan	1	Oktober	Pusat AE	-
2	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	1	Mengurangi Risiko	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Buku DPHN	1	Desember	Pusat AE	-

Jakarta,
Kepala Satker X

XYZ
NIP. 19700429 199103 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Koordinasi melalui Forum Tanggapan dan Forum Pemantauan	Laporan	1	1	100,00	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	1	1	100,00	0,00	Diisi dengan rekomendasi perbaikan
2	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Buku DPHN	1	1	100,0	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	1	1	100,00	0,00	

Jakarta,

Kepala Satker X

XYZ

NIP. 19700429 199103 1 001